

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dapat dianggap sebagai proses untuk melengkapi siswa dengan keahlian, pengetahuan dan sopan santun sehingga mereka dapat hidup dan menghasilkan hal-hal yang berguna dalam masyarakat setelah mereka resmi keluar dari tempat pendidikan¹. Pendidikan dalam hal ini berkewajiban untuk membentuk sikap dan perilaku siswa yang santun serta terdidik. Oleh karena itu, selain untuk mengembangkan potensi pengetahuan siswa, sekolah juga dituntut untuk memberikan contoh perilaku yang baik agar mereka dapat siap bertindak di masyarakat nantinya. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah juga mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di samping mengajarkan berbagai keterampilan dan kepandaian kepada para siswanya².

Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, mempunyai tanggung jawab yang besar ketika dihadapkan oleh pengembangan diri seorang siswanya. Kondisi masyarakat yang menuntut anak untuk mempersiapkan diri secara baik, agar dapat memasuki kehidupan yang lebih baik dengan berbagai spesialisasi lapangan kerja yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian kerja yang professional³. Maka dari itu, sekolah dituntut untuk menjadi lebih giat dalam mempertegas segala

¹ Mukhneri, *Manajemen Sistem*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2008, h. 61.

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 150.

³ Hamdani, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h. 57.

kebijakan yang di terdapat di sekolah, baik dari segi pengembangan akademik peserta didik maupun dalam segi kontrol perilaku siswanya.

Kewajiban sekolah dalam hal mengatur tingkah laku muridnya sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial yang terdapat di sekolah. Kondisi sosial yang bersifat patologis telah menyebabkan kontrol orang dewasa terhadap para remaja menjadi semakin berkurang⁴. Sifat yang patologis ini nantinya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan oleh siswa di sekolah. Oleh karena itu, kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak sekolah sangat dibutuhkan oleh siswa agar terciptanya proses pembelajaran yang aman dan nyaman.

Kontrol sosial ialah pengawasan/pengendalian oleh masyarakat terhadap tingkah laku individu berupa kontrol psikologis dan nonfisik⁵. Kontrol sosial ini akan berpengaruh terhadap perilaku yang dilakukan oleh siswa di sekolah, ketika pengaruh itu diinternalisasi maka akhirnya akan menjadi norma bagi siswa. Sebaliknya, jika pengaruh dari adanya kontrol sosial tersebut tidak diterima maka akan menyebabkan terjadinya perilaku siswa bermasalah. Tujuan kontrol bermacam-macam pada satu pihak diinginkan perubahan, pembangunan perluasan mobilitas sosial, di lain pihak ada usaha untuk mempertahankan *status quo* dan melestarikan budaya yang ada⁶. Dari tujuan kontrol sosial yang ada inilah maka diperlukannya kerjasama yang baik

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 73.

⁵ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 37.

⁶ *Ibid.*, h. 37.

diantara para pihak yang terkait, agar terciptanya keserasian dan kenyamanan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Namun dalam hal penentuan hukuman, lembaga pendidikan khususnya sekolah berbeda dalam penerapan hukuman sebagai kontrol sosial murid-muridnya. Hal ini dikarenakan murid-murid di lingkungan sekolah tidak ubahnya masih merupakan anak di bawah umur. Mereka tidak dapat diberikan hukuman sama seperti orang dewasa, karena nantinya dapat mengganggu perkembangan kepribadian seorang anak. Mereka merupakan anak yang masih labil dan suka berubah-ubah dalam hal suasana hatinya, sehingga sangat mudah terpancing amarah untuk melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran.

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan, dalam fase ini seorang anak mulai menyadari adanya tugas dan tanggung jawab⁷. Terdapat beberapa ketentuan hukum bagi anak di bawah umur 16 tahun atau dalam hal ini masih dalam status pelajar. Aturan pertama, anak di bawah umur 16 tahun tidak dipidana. Sedangkan untuk aturan kedua, hakim memerintahkan supaya anak yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah diserahkan kepada negara untuk dididik, tanpa pidana apapun⁸. Jika ternyata orang tua/wali/pengasuhnya tidak mampu untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, maka alternatif yang cukup memadai adalah meyerahkan kepada negara untuk dididik. Kedua ketentuan hukum tersebut tidak

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, h. 173

⁸ *Ibid.*, h. 29.

ubahnya dibuat untuk melindungi segala hak dan kepentingan anak tersebut, agar dapat selalu berkembang tanpa terganggu perkembangan psikisnya.

Konsep kontrol sosial ini memerlukan realisasi dalam kehidupan masyarakat, dapat dipastikan pelaksanaan prevensi tidak mungkin apabila hanya dilaksanakan oleh masing-masing lembaga secara sendiri-sendiri⁹. Akan tetapi pelaksanaan tersebut memerlukan kerja sama yang erat satu sama lain. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara semua elemen terkait di dalamnya, masyarakat, anak, lembaga pendidikan, serta orang tua anak tersebut. Oleh karena generasi muda tersebut masih dalam cakupan masyarakat, berarti mereka berhak mendapatkan penyuluhan tentang kesadaran hukum.

Dalam ruang lingkup sekolah, yang memiliki hak di dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap siswa yakni manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik mulai masuk sampai akhir atau lembaga pendidikan. Manajemen kesiswaan bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur serta mampu mencapai tujuan pendidikan sekolah¹⁰. Manajemen kesiswaan tersebut mempunyai segala kewajiban untuk mengatur pola perilaku siswanya, yakni melalui peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan.

Salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah melalui pihaknya di manajemen kesiswaan yakni diterapkannya sistem poin pelanggaran.

⁹ Sudarsono, *op. cit.* h. 35.

¹⁰ Hamdani, *op. cit.* h. 186.

Pada sistem poin pelanggaran siswa ketika melakukan pelanggaran akan mendapatkan poin sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukannya. Namun tidak sedikit lembaga pendidikan yang hanya menggunakan sistem poin pelanggaran tersebut hanya sebagai tempelan bagi tata tertib saja. Mereka hanya mempunyai tata tertib dalam bentuk poin tersebut di sekolahnya, tetapi dalam hal penerapannya tidak maksimal. Di mana masih sering terjadinya hukuman fisik yang dilakukan oleh berbagai pihak guru. Hal ini dikarenakan karena tidak jarang nya pihak sekolah yang belum memahami sistem poin pelanggaran tersebut maupun masih ada pihak guru yang masih memiliki sifat tradisional yang masih menganggap bahwa hukuman fisik masih efektif dalam pemberian hukuman siswa.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran yang diterapkan sekolah merupakan fokus kajian utama dari penelitian ini. Selain itu dari adanya kebijakan yang diterapkan sekolah ini mengakibatkan beberapa dampak baik bagi para murid ataupun guru yang mengajar. Dari latar belakang yang terdapat pada penelitian di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem poin pelanggaran di sekolah SMP Negeri 192 Jakarta?
2. Bagaimana dampak penerapan sistem poin pelanggaran bagi siswa di SMP Negeri 192 Jakarta?

C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian ini tentu saja mempunyai tujuan dan manfaat seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian antara lain:

- Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan sistem poin pelanggaran di sekolah SMP Negeri 192 Jakarta.
- Untuk mendeskripsikan dampak yang terjadi karena diterapkannya sistem poin pelanggaran bagi siswa di SMP Negeri 192 Jakarta.

Selain tujuan dan manfaat, penelitian ini mempunyai signifikansi secara teoritis dan praktis antara lain sebagai berikut:

- Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi serta memperkaya kajian mengenai perilaku siswa dalam dunia pendidikan, khususnya terhadap perilaku yang melanggar tata tertib sekolah.
- Secara Praktis, secara praktis penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana penyebab siswa melakukan pelanggaran serta memberikan solusi terbaik dalam penanganan siswa tersebut.

D. Tinjauan Penelitian Sejenis

Pada tinjauan penelitian sejenis yang pertama adalah Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa Pada SMAN 1 Jekulo Kudus oleh Uly Inayati Taqiyya.¹¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian, SMA N 1 Jekulo Kudus ada beberapa jenis pelanggaran

¹¹ Uly Inayati Taqiyya, *Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa Pada SMAN 1 Jekulo Kudus*, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, 2013, Universitas Negeri Semarang.

dalam tata tertib sekolah, diantaranya terlambat masuk sekolah, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara, memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan model. Di dalam kasus penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran bukan hanya tanggung jawab waka kesiswaan dan guru BK saja, tetapi juga seluruh guru dan karyawan SMA N 1 Jekulo Kudus. Setiap warga sekolah yang mengetahui ada siswa yang kurang tertib atau melakukan pelanggaran tata tertib harus mencatat dalam daftar pelanggaran siswa, atau bisa langsung dibawa ke bagian piket agar siswa mencatat pelanggaran yang dilakukannya. Penerapan sistem poin dalam tata tertib SMA N 1 Jekulo Kudus sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku siswa. Semakin hari pelanggaran yang dilakukan oleh siswa semakin berkurang. Walaupun belum sepenuhnya menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, setidaknya sistem poin dapat mengurangi tingkat pelanggaran siswa setiap harinya.

Kebijakan penerapan sistem poin juga tidak luput dari kendala pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan sistem poin adalah:

1. Kendala dari siswa

Menurut penuturan Joko (50th) dalam wawancara tanggal 03 Juni 2013 bahwa kendala-kendala yang di hadapi terletak pada siswa itu sendiri. Siswa yang sering melakukan pelanggaran dipengaruhi oleh karakter siswa yang sulit untuk diatur.

2. Kurangnya dukungan dari orang tua siswa

Kendala lain yang dihadapi oleh pihak sekolah adalah kurangnya dukungan dan perhatian orang tua untuk anaknya.

3. Administrasi yang belum tertata

Kendala lain yang dihadapi pihak sekolah dalam menerapkan sistem poin diutarakan oleh Heru (48th), bahwa salah satu kendala adalah pada administrasi yang belum begitu tertata. Karena penerapan sistem poin baru dilaksanakan jadi pembukuannya belum ada. Hanya sebatas catatan pribadi siswa, tanpa ada rekapitulasinya tiap bulan.

Pada penelitian sejenis selanjutnya yaitu membahas mengenai Pengaruh Hukuman Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah (Studi Kasus: Hukuman Oleh Guru Terhadap Siswa/Siswi di SMAN 31 Jakarta) oleh Dede Kurniasih.¹² Hasil penelitian yang dilakukan di SMAN 31 mendapatkan hasil bahwa proses pendidikan yang terjadi adalah guru-gurunya mayoritas menggunakan sistem klasikal, hal ini dikarenakan masih banyaknya guru-guru senior yang berusia lanjut dan menunggu masa pension sehingga metode pembelajaran yang digunakan masih tradisional yaitu berprinsip bahwa siswa diibaratkan sebagai bejana kosong yang perlu diisi, dibentuk kepribadiannya oleh guru yang dianggap sebagai pihak yang berkuasa atau berwenang dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan di dalam pemberian hukuman, dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian guru SMAN 31 Jakarta memberikan hukuman dalam bentuk hukuman fisik yang disebut *corporal*

¹² Dede Kurniasih, *Pengaruh Hukuman Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah (Studi Kasus: Hukuman Oleh Guru Terhadap Siswa/Siswi di SMAN 31 Jakarta)*, Jurusan Sosiologi, 2010, Universitas Negeri Jakarta.

punishment negatif. Hukuman yang dilakukan oleh guru ditunjang oleh tindakan ataupun sikap siswa dimana tujuan guru tersebut adalah untuk menegakkan disiplin, untuk membentuk karakter siswa.

Penelitian berikutnya yaitu membahas tentang Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan Di SMAN 2 Pontianak oleh Cahyo Fitriawati, Sulistyarini & Parijo.¹³ Penelitian ini berbentuk jurnal dengan hasil penelitian yakni SMA N 2 Pontianak mempunyai kebijakan sistem poin dalam aturan atau tata tertib yang telah lama diterapkan. sistem poin merupakan suatu kebijakan sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan cara memberikan poin atau skor pada setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dapat dikatakan sistem poin merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial represif karena pelaksanaan sistem poin dilakukan setelah perilaku menyimpang atau pelanggaran terjadi. Adapun penerapan sistem poin ini dilihat dari 4 item penting yakni tahapan pemberitahuan, bentuk teguran, bentuk peringatan dan bentuk hukuman.

Tahapan pertama adalah pemberitahuan, pada bentuk pemberitahuan dalam kebijakan sistem poin di SMA Negeri 2 Pontianak telah mengaplikasikannya kedalam berbagai bentuk. Bentuk pertama adalah sosialisasi saat MOS (Masa Orientasi Siswa) yang dilakukan pada saat awal ajaran baru, bentuk kedua ialah penyebaran surat

¹³ Cahyo Fitriawati, dkk, *Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan Di SMAN 2 Pontianak*, Jurnal Elektronik, 2014, <http://jurnal.untan.ac.id/> diakses pada 23 Desember 2016 pukul 16.00

edaran kepada orang tua siswa mengenai tata tertib di SMA N 2 Pontianak serta kebijakan sistem poin yang telah ditetapkan, bentuk ketiga yaitu penempelan tata tertib yang berisi aturan, bobot poin pelanggaran beserta konsekuensinya, dan yang terakhir ialah adanya gambar yang ada dilingkungan SMA Negeri 2 Pontianak merupakan salah satu bentuk pemberitahuan yang bertujuan untuk mengingatkan tentang tata tertib yang ada.

Tahapan kedua ialah teguran, adanya teguran dalam kebijakan sistem poin yang diberikan kepada siswa dimaksudkan untuk memberitahu bahwa ada perilaku yang salah. Teguran bagi peserta didik terbagi menjadi dua macam yakni teguran langsung dan teguran tak langsung.

Tahapan ketiga dalam kebijakan ini adalah peringatan, bentuk peringatan merupakan tahap lanjutan kepada siswa yang masih terus melanggar aturan. Setelah teguran diberikan kepada siswa, namun siswa tidak menggubrisnya atau masih melanggar aturan, maka dalam hal ini wajib memberikan peringatan terhadapnya.

Tahapan keempat yakni hukuman, setiap sekolah memiliki suatu cara atau kebijakan dalam menetapkan aturan atau tata tertib beserta hukuman yang harus diterima oleh siswa, di SMA Negeri 2 Pontianak tidak memberlakukan hukuman fisik. Adapun hukuman dalam kebijakan sistem poin yang berlaku di SMA Negeri 2 Pontianak yakni: (a) *Skorsing*, *Skorsing* merupakan suatu bentuk hukuman dengan cara melarang anak masuk sekolah dalam jangka waktu tertentu serta poin sudah mencapai angka 75; (b) *Home Visit* ialah kunjungan kerumah siswa oleh guru BK

untuk mengetahui latarbelakang keluarganya dan bagaimana siswa tersebut dirumah. Hukuman ini diberlakukan jika siswa sudah mencapai poin 90; (c) Hukuman ini berlaku jika poin siswa sudah mencapai angka 100, hal ini dilakukan dikarenakan pihak sekolah sudah tidak mampu untuk membimbing siswa yang bersangkutan, siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua.

Tinjauan Penelitian sejenis yang selanjutnya yaitu membahas mengenai “Pelatihan tata tertib lalu lintas melalui program patroli keamanan sekolah di sman 104 jakarta” yang disusun oleh Atik Kurniawati.¹⁴ Penelitian ini berisikan mengenai masalah sosial yang kerap kali terjadi bersumber dari lemahnya sumber daya manusia, dan hal ini menjadi salah satu tanggung jawab dunia pendidikan. Pendidikan lalu lintas adalah hal yang penting, namun belum menjadi yang utama. Hal ini karena pendidikan lalu lintas sedikit terhalang memasuki pendidikan formal sebagai salah satu mata pelajaran sekolah. Jika dilihat dari penamaan “patroli keamanan sekolah” mulanya program ini bertujuan untuk membentuk karakter mandiri pada siswa sekolah guna menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah.

Dalam melaksanakan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), keamanan sekolah pihak dikyasa polda metro jaya bekerjasama dengan sekolah melaksanakan program pks. Model pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan PKS yaitu terbagi menjadi 2, pertama pembelajaran secara teoritis artinya instruktur menyampaikan materi-materi,

¹⁴ Atik Kurniawati, *Pelatihan Tata Tertib Lalu Lintas Melalui Program Patroli Keamanan Sekolah Di SMAN 104 Jakarta*, Jurusan Sosiologi, 2014, Universitas Negeri Jakarta.

seperti etika berlalu lintas, tata cara berlalu lintas, pengenalan pasal-pasal yang tercantum dalam UULAJ Nomor 22 tahun 2009. Setelah peserta pelatihan dirasa mampu memahami segala materi yang telah disampaikan dengan penilaian tersendiri, maka siswa peserta pelatihan mendapat *badge* PKS.

Setelah melalui proses pembelajaran teoritis, dilanjutkan dengan praktik. Artinya siswa siswi turun ke lapangan untuk belajar secara langsung mengenai 12 pengaturan gerak dasar lalu lintas. Selain itu siswa juga diberikan simulasi untuk menangani masalah kecelakaan, karena sebagai anggota pks tidak boleh pasif melainkan harus aktif untuk membantu korban kecelakaan dan mengatur lalu lintas di tkp. Terdapat dua tipe yang bersifat objektif maupun subjektif

Tinjauan penelitian sejenis terakhir yakni jurnal internasional yang berjudul “*The Impacts Of Corporal Punishment On Students’ Academic Performance/Career And Personality Development Up-To Secondary Level Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan*”¹⁵. Penelitian ini bercerita mengenai vitalnya peran seorang guru untuk memainkan peran positif mereka dalam pengembangan suatu bangsa atau negara dengan menghasilkan siswa yang berkualitas melalui pendidikan berkualitas.

Penelitian ini dilakukan di Chakdara Kota dan daerah sekitarnya dari Kabupaten Dir (Lower), Provinsi Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. Sejumlah total 360 sampel

¹⁵ Dr. Arab Naz, dkk, *The Impacts Of Corporal Punishment On Students’ Academic Performance/Career And Personality Development Up-To Secondary Level Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan*, Jurnal Eletronik, 2016, [Http://ijbssnet.com/journals/](http://ijbssnet.com/journals/) diakses pada 12 Januari 2016.

telah diambil dari kedua strata dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* melalui metode alokasi proporsional menggunakan jadwal wawancara untuk pengumpulan data yang terdiri dari pertanyaan dengan beberapa-opsi yang berkaitan dengan hukuman fisik dan dampaknya terhadap akademisi, jiwa dan kepribadian siswa. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis dengan menggunakan SPSS.

Hukuman fisik negatif mempengaruhi kinerja akademik siswa. Di dalam hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hukuman fisik berhubungan dengan performa akademik / karir siswa yang secara eksplisit digambarkan oleh hasil penelitian ini. Diskusi tentang dampak telah ditarik dalam persentase memiliki analisis komparatif dari hukuman ringan dan berat dalam bentuk rasio. Responden telah jelas disebutkan bahwa hukuman fisik berat memiliki efek lebih terhadap kinerja / karir akademik (65 %) sedangkan hukuman fisik ringan memiliki dampak buruk (35 %).

Tabel I.1
Perbandingan Tinjauan Pustaka

| Nama Peneliti | Judul Penelitian, Permasalahan Penelitian | Landasan Konsep Dan Teori | Metodologi Penelitian | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|
| Uly Inayati Taqiyya | <i>Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Poin Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Siswa Pada SMAN 1 Jekulo Kudus.</i> Adakah keefektifan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran siswa pada SMAN 1 Jekulo Kudus. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penguatan (<i>reinforcement</i>) • Hukuman (<i>punishment</i>) • Sistem poin • Pelanggaran tata tertib | <ul style="list-style-type: none"> • Metode: deskriptif • Pendekatan: Kualitatif • Teknik Pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi | Dari hasil penelitian, terungkap bahwa penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran bukan hanya tanggung jawab waka kesiswaan dan guru BK saja, tetapi juga seluruh guru dan karyawan SMA N 1 Jekulo Kudus. |
| Dede Kurniasih | <i>Pengaruh Hukuman Dalam Proses Pendidikan Di Sekolah (Studi Kasus: Hukuman Oleh Guru Terhadap Siswa/Siswi di SMAN 31 Jakarta).</i> Bagaimana hukuman dijadikan proses pendidikan di sekolah? Bagaimana <i>Corporal Punishment</i> yang dilakukan guru di sekolah? Tujuannya penelitian yakni ingin mengetahui bentuk hukuman yang diberikan guru serta dampaknya bagi siswa. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian hukuman di sekolah • <i>Corporal Punishment</i> di sekolah • Psikologi perkembangan remaja | <ul style="list-style-type: none"> • Metode: deskriptif • Pendekatan: Kualitatif • Teknik Pengumpulan data: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. | Berdasarkan penelitian penentuan disiplin melalui tata tertib dan hukuman di SMAN 31 Jakarta saat ini sepenuhnya merupakan otoritas pihak sekolah tanpa ada campur tangan dari pihak Diknas Pendidikan DKI Jakarta. |
| Cahyo Fitriawati, Sulistyarini & Parijo | <i>Penerapan Sistem Poin Dalam Menanggulangi Siswa Yang Melanggar Aturan Di SMAN 2 Pontianak.</i> Bagaimana disiplin dapat menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sekolah? | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem poin pelanggaran • Hukuman | <ul style="list-style-type: none"> • Metode: Deskriptif • Pendekatan: kualitatif • Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi dan dokumentasi | Penerapan sistem poin dapat dilihat dari 4 item penting yakni tahapan pemberitahuan, bentuk teguran, bentuk |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | | | | peringatan dan bentuk hukuman. |
| Atik Kurniawati | <p><i>Pelatihan tata tertib lalu lintas melalui program patroli keamanan sekolah di sman 104 jakarta.</i></p> <p>Bagaimana implementasi pelatihan program patroli keamanan sekolah di SMAN 104 Jakarta?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Konsep tata tertib • Peraturan lalu lintas | <ul style="list-style-type: none"> • Metode: Deskriptif • Pendekatan: kualitatif • Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi dan dokumentasi | <p>Model pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan pks yaitu terbagi menjadi 2, pertama pembelajaran secara teoritis artinya instruktur menyampaikan materi-materi, Setelah melalui proses pembelajaran teoritis, dilanjutkan dengan praktik.artinya siswa siswi turun ke lapangan untuk belajar secara langsung mengenai 12 pengaturan gerak dasar lalu lintas</p> |
| Dr. Arab Naz, Waseem Khan, Umar Daraz, Mohammad Hussain & Qaisar Khan. | <p><i>The Impacts Of Corporal Punishment On Students' Academic Performance/Career And Personality Development Up-To Secondary Level Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan.</i></p> <p>Guru memiliki peran penting untuk memainkan peran positif mereka dalam pengembangan suatu bangsa atau negara dengan menghasilkan siswa yang berkualitas melalui pendidikan berkualitas</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Hukuman fisik (ringan dan berat) | <p>Metode: survey</p> <p>Pendekatan: kuantitatif</p> <p>Bentuk penelitian: studi hubungan</p> <p>Teknik pengumpulan data: sampel acak</p> | <p>Hukuman fisik membawa efek negatif pada psikologi siswa dan hampir menghancurkan proses pengembangan kepribadian siswa.</p> |

Sumber: Diolah dari Uly Inayati Taqiyya, 2013., Dede Kurniasih, 2010., Cahyo Fitriawati, Sulistyarini & Parijo, 2015., Atik Kurniawati, 2014., Dr. Arab Naz, Waseem Khan, Umar Daraz, Mohammad Hussain & Qaisar Khan, 2016.

Riset yang dilakukan peneliti merupakan perkembangan dari riset-riset sebelumnya yang telah dilakukan. Pada riset sebelumnya hanya tercakup kepada pembahasan mengenai pelaksanaan tata tertib yang ada di sekolah sebagai pembentukan disiplin siswa. Tata tertib tersebut terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, mulai dari pemberian hukuman dalam proses pembelajaran di sekolah, pelatihan tata tertib lalu lintas melalui program patroli keamanan sekolah, penerapan sistem poin dalam penanggulangan siswa yang melanggar, hingga yang terakhir riset mengenai hubungan antara pemberian hukuman fisik dengan pengembangan kepribadian siswa.

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil sisi menarik diantara kelima penelitian sejenis sebelumnya, yaitu mengenai tata tertib sekolah yang berbentuk sistem pelanggaran serta melihat dampak dari sistem poin tersebut terhadap interaksi siswa di sekolah serta prestasi dalam proses pembelajaran mereka. Peneliti memilih sistem poin pelanggaran dikarenakan pada saat ini sistem poin pelanggaran dapat dikatakan sebagai tata tertib yang paling ideal untuk diterapkan di sekolah. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam pemberian hukuman oleh guru untuk siswa yang melanggar aturan. Keterbatasan tersebut diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, dimana dalam undang-undang dijelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Sehingga sistem poin pelanggaran menjadi alat paling vital untuk menciptakan disiplin siswa di sekolah.

E. Kerangka Konsep.

1. Institusi Sekolah

Sekolah sebagai institusi pendidikan merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kaitannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada pada suatu tatanan yang rumit dan saling berkaitan¹⁶. Sekolah sebagai institusi juga mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan pola pikir serta pola perilaku siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan siswa agar siap untuk bertindak di masyarakat nantinya.

Sebenarnya inti sekolah sebagai institusi sekolah, yaitu adalah proses mendidik yang dilakukan oleh sekolah bertujuan membimbing anak agar kelak dapat hidup serasi dengan masyarakat di tempat hidupnya¹⁷. Maka dari itu, dibutuhkannya kerjasama yang erat antara lapisan masyarakat beserta sekolah untuk menyelaraskan norma yang akan diberlakukan. Hal ini dikarenakan ketika terdapat keserasian diantara masyarakat dan juga sekolah, maka dalam mendidik seorang siswa juga akan menjadi lebih mudah.

¹⁶ Aswandi Bahar, *Dasar-dasar kependidikan*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan tinggi proyek pengembangan lembaga tenaga kependidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. 1989, Universitas Riau Pekanbaru, h. 59.

¹⁷ Abu Ahmad, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015, h. 225.

Sedangkan dalam perspektif sosiologis, yakni Gramsci menjelaskan sekolah melalui konsep hegemoni miliknya. Hegemoni adalah kekuasaan sekelompok kelas terhadap kelas-kelas lain di bawahnya dengan cara persuasif. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis¹⁸. Terdapat relevansi konsep hegemoni yang dijelaskan Gramsci dengan pendidikan. Pada kasus ini Gramsci mengatakan bahwa ada muatan politik dan ideologi dalam semua aktifitas pendidikan, baginya pendidikan adalah lembaga untuk melancarkan hegemoni kelas penguasa kepada kelas tertindas¹⁹.

Pelaksanaan berbagai proses pembelajaran yang terjadi di sekolah merupakan hal yang berbeda pada setiap institusi sekolah, hal ini berkaitan dengan manajemen sekolah masing-masing. Manajemen berbasis sekolah tersebut meliputi manajemen pembelajaran berbasis sekolah, manajemen peserta didik berbasis sekolah, manajemen tenaga kependidikan berbasis sekolah, manajemen prasarana dan sarana berbasis sekolah, manajemen keuangan berbasis sekolah, manajemen kelas, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, manajemen layanan khusus pendidikan berbasis sekolah²⁰. Berbagai manajemen yang terdapat di sekolah berkewajiban untuk menyediakan segala kebutuhan siswa, baik itu kebutuhan akan pengetahuan maupun kebutuhan akan pola perilaku.

¹⁸ Mukhrizal Arif, dkk, *Pendidikan Posmodernisme*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h. 103.

¹⁹ *Ibid.*, h. 113.

²⁰ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, h. 3.

3. Teori Kontrol

Pokok pemikiran teori kontrol adalah bahwa penyimpangan yang terjadi karena hilangnya kontrol sosial. Berkurangnya kontrol sosial akan mendorong penyimpangan, karena orang secara alamiah akan menjadi bebas berperilaku²¹. Oleh karena itu, menurut pandangan teori kontrol sangat diperlukannya kontrol sosial yang ada bagi terciptanya perilaku taat tata tertib bagi siswanya. Kontrol sosial yang kuat akan menjadikan siswa tertib serta taat tata tertib, sehingga perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa juga akan dapat berkurang. Sedangkan Hirschi menyatakan bahwa sebuah proses sosialisasi yang tidak efektif akan melahirkan kontrol diri yang rendah yang pada gilirannya memungkinkan pencarian pemuasan yang bersifat langsung dan sederhana²².

Travis Hirschi menjelaskan bahwa terdapat kontrol internal serta kontrol eksternal yang berpengaruh terhadap terjadinya kontrol. Dia mengemukakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal, yaitu²³:

- a. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya.
- b. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan.

²¹ Jokie Siahaan, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2004, h. 6.11.

²² George Ritzer, *The Wiley Blackwell Companion To Sociology*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, h. 367.

²³ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, hh 96-97.

- c. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan masyarakat.
- d. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan atau kepatuhan terhadap norma-norma sosial akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang.

Kontrol eksternal yang berpengaruh terhadap adanya kontrol perilaku siswa di sekolah, yakni terdapat pada adanya pemberian *reward and punishment*²⁴. Kontrol eksternal ini juga berpengaruh terhadap terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa, namun tidak seperti kontrol internal kontrol eksternal ini lebih mementingkan adanya konsekuensi dari hasil tindakan yang dilakukan. Ketika seorang individu melakukan tindakan baik maka mereka akan diberikan hadiah, begitupun sebaliknya ketika seorang individu berperilaku menyimpang maka hukuman akan diberikan baik itu berupa sanksi maupun teguran.

4. Hukuman peserta didik

Hukum merupakan hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di dalam suatu kelompok masyarakat. Hukum secara konkret nampak di hadapan kita dalam bentuk peraturan, undang-undang, ketetapan, kontrak perjanjian yang merumuskan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia²⁵. Tujuan hukuman adalah sebagai alat pendidikan di

²⁴ George Ritzer, *op.cit.* h. 368.

²⁵ Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, h. 9.

mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Terdapat pedoman dalam pemberian hukuman, yakni sebagai berikut²⁶:

1. *Punitur, qunnia no peccatum*, yang artinya dihukum karena peserta didik memang bersalah.
2. *Punitur no peccatum*, yang artinya dihukum agar peserta didik tidak lagi berbuat kesalahan.

Ada beberapa macam hukuman yaitu hukuman fisik serta hukuman non-fisik. Hukuman fisik antara lain memukul, menjewer, mencubit, menendang, dan sebagainya. Namun hukuman tersebut sudah jarang dipergunakan karena terbukti tidak efektif untuk mengubah perilaku peserta didik. Bahkan jika guru menggunakan hukuman ini hingga menyebabkan cedera pada peserta didik, maka guru tersebut dapat diajukan ke pengadilan sebagai orang yang bersalah melakukan penganiayaan. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya pemberian denda, skorsing dari kegiatan pembelajaran, maupun pemberian poin pelanggaran. Hukum ini dijadikan oleh manusia sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya agar perilakunya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat tersebut. Kalau ada orang yang melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan itu maka ada sanksinya dalam bentuk hukuman. Hukum yang berlaku di setiap daerah selalu berbeda satu sama lainnya, semua tergantung terhadap budaya serta lingkungan sekitarnya.

Hukum yang berlaku di setiap tempat tidak ubahnya sebagai turunan dari ideologi yang dianut oleh masyarakatnya. Ideologi sendiri merupakan suatu sistem idea-idea

²⁶ Ali Imron, *op. cit.* h. 69.

suatu *establishment*, suatu gerakan atau organisasi untuk mempertahankan status quo-nya. Ideologi dianggap tertutup, tidak bersifat ilmiah, terikat pada suatu struktur kekuasaan tertentu²⁷. Di Indonesia ideologi yang dianut yakni ideologi pancasila, oleh karenanya peraturan serta hukum yang berlaku juga terpengaruh dari pancasila tersebut. Mulai dari hukum Negara, hukum daerah, bahkan sampai dengan hukum yang terdapat di sekolah. Di dalam dunia pendidikan juga terdapat hukum yang berlaku untuk mengatur perilaku warga suatu sekolah. Hukum tersebut biasanya dituangkan dalam suatu peraturan sekolah atau yang biasanya disebut dengan tata tertib.

Kode etik, yang merupakan terjemahan dari *ethical code*, adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu. Ia berisi rumusan baik-buruk, boleh-tidak boleh, terpuji-tidak terpuji, yang harus dipedomani oleh seseorang dalam suatu lingkungan tertentu²⁸. Aturan-aturan tersebut, bisa berupa yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya adalah tradisi-tradisi yang lazim ditaati di dunia pendidikan khususnya sekolah. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa merupakan hasil dari tindakan siswa yang menyimpang dari segala peraturan yang berlaku, baik itu dari segi peraturan tertulis maupun dari peraturan non-tertulis.

Hukuman yang diberikan oleh suatu institusi terhadap anggotanya sangat berkaitan erat dengan respon yang dilakukan oleh anggota terhadap tata tertib yang

²⁷ Gunawan Setiardja, *op. cit.* h. 123.

²⁸ Ali Imron, *op. cit.* h. 164.

ada. Pada kajian ini yakni respon yang dilakukan siswa terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. Terdapat empat macam respon siswa yang sering dilakukan terhadap sekolah yaitu²⁹:

1) *Situasional Withdrawal*

Dalam hal ini para siswa tidak menerima situasi (hukuman) yang diberikan sekolah pada mereka, dan mereka menentang dan bahkan mengabaikannya. Contoh dari *situasional withdrawal* yaitu dalam pengertian lalai (*failure*). Seorang siswa memperlihatkan kelesuan dan acuh terhadap lingkungannya pada saat di kelas, kecuali kalau bel berbunyi maka dia semangat bersiap untuk pulang. Contoh lainnya adalah kadang-kadang hanya terjadi pada bidang studi tertentu yang dianggap sulit oleh siswa seperti bahasa inggris dan matematika yang akhirnya membuat lalai mereka.

2) *Intransigence*

Intransigence ini adalah merupakan perlawanan (menentang) secara terang-terangan terhadap otoritas sekolah atau kelas tertentu. Disini siswa menolak untuk menerima atau mematuhi, secara terang-terangan berlagak atau melanggar peraturan sekolah dan melawan seorang dengan beraksi. Dalam beberapa hal siswa menganggap mereka mempunyai orang kuat yang dapat membela mereka seperti orang tua mereka yang bekerja di Kanwil Departemen Pendidikan, Kepala Sekolah dan lain-lain. Suatu bahaya dalam hal ini adalah bahwa para siswa merasa bebas dari

²⁹ Aswandi Bahar, *op. cit.* h. 65.

hukuman sekalipun mereka berbuat salah, yang harusnya diberikan hukuman atau saknsi.

3) *Colonization*

Colonization merupakan respon yang dilakukan siswa yang merasa bahwa tidak ada yang dapat mereka kerjakan di sekolah. Disini para siswa menganggap bahwa sekolah tidak banyak membantu dalam pemenuhan keinginan dan harapan mereka. Tetapi mereka mengatakan lebih baik pergi juga ke sekolah daripada main-main di jalanan atau membolos menjadi gelandangan yang tidak mempunyai arah dan tujuan hidupnya. Sehingga siswa tidak menganggap sekolah sebagai fungsi nyata atau manifest untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tetatpi hanya sekedar fungsi laten saja seperti tempat bermain, tempat untuk bergaul dengan teman dan lain-lain.

4) *Conversion*

Conversion atau perubahan dapat terjadi apabila para siswa menerima segala peraturan yang dijalankan sekolah. Pada sekolah tertentu conversi ini dapat berjalan mulus dan lancar dan pada sekolah lain barangkali agak sulit. Ada suatu contoh yang dikemukakan Goffman bahwa sekolah-sekolah yang muridnya lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya biasanya peraturan di sekolah itu dapat dipatuhi dan diterima dengan baik oleh para siswa. Karena biasanya yang melanggar peraturan adalah lebih banyak siswa laki-lakinya daripada siswa perempuannya.

Terdapat kesimpulan terhadap apa yang dipaparkan Goffman, yakni terdapat dua kondisi siswa yaitu pertama siswa telah mengetahui tingkah laku yang diharapkan

sekolah serta menerima aturan yang diberikan sekolah sebagai aturan yang harus dimiliki oleh dirinya. Dalam proses ini siswa mendapatkan kemudahan dalam menerima dan menyesuaikan diri dan atau hanya sedikit mengalami kesulitan dalam sistem sekolah tersebut. Oleh karena itu, respon yang diberikan siswa terhadap adanya tata tertib yang berlaku juga sangat mempengaruhi berbagai hukuman atau konsekuensi yang akan didapat olehnya ketika mereka mengikuti berbagai proses pembelajaran yang ada di sekolah.

4. Tata Tertib

Masing-masing komunitas dalam sebuah masyarakat memiliki tata tertib atau sebuah aturan. Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar berjalan dengan stabil. Begitu pula halnya dengan lembaga pendidikan, baik itu sekolah maupun universitas. Walaupun berbeda-beda dalam setiap sekolah untuk menentukan tata tertibnya, ada banyak kesamaan di masing-masing tata aturan dan tata tertib yang diberlakukan sekolah-sekolah. Tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar³⁰. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah, dan siswa saling mendukung tata tertib sekolah, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan sekolah.

³⁰ Muhammad Rifa'I, *Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, h. 140.

Pada hakikatnya, tata tertib sekolah baik yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga unsur berikut³¹.

- Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang.
- Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar peraturan.
- Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib.

Tata tertib yang berlaku di sekolah merupakan peraturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah maupun institusi sekolah itu sendiri. Dalam hal ini SMP Negeri 12 menerapkan tata tertib yang berbeda dibandingkan oleh tata tertib yang diberlakukan sekolah lainnya. Tata tertib yang dijalankan oleh sekolah tersebut yaitu adalah sistem poin pelanggaran. Sistem poin pelanggaran ini dijadikan sekolah sebagai pedoman di dalam siswa bertindak dan berperilaku di lingkungan sekolahnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus ke tema

³¹ Ibid., h. 142.

umum dan menafsirkan data.³². Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan dan menarasikan secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan sistem poin ini di sekolah. Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti di dalam melakukan pemenuhan kebutuhan data yakni studi kasus, dengan cara meneliti suatu kasus yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu³³. Studi kasus yang diterapkan pada kali ini yakni kasus yang terjadi pada salah satu sekolah menengah pertama negeri di Jakarta, atau lebih tepatnya SMP Negeri 192 Jakarta.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di Sekolah SMP Negeri 192 Jakarta yang beralamat di Jalan Kramat IV No. 100 Cipayung, Jakarta Timur. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat bertemu langsung kepada guru serta kepala sekolah yang mengurus bidang kesiswaan yang terkait masalah kebijakan sistem poin.

Subjek penelitian ini difokuskan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang membuat kebijakan sistem poin ini tetap berlanjut di sekolah. Hal ini dikarenakan judul yang diangkat oleh peneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan sistem poin ini di sekolah serta dampaknya bagi guru dan siswa. Selain wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, penelitian juga mengumpulkan data dari guru serta murid yang mengalami dampak dari kebijakan sistem poin ini. Dimana dari pihak guru yakni pihak yang menerapkan sistem poin pelanggaran, sedangkan siswa merupakan penerima kebijakan sistem poin tersebut. Subjek penelitian ini antara lain

³² John W. Creswell, *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2013, h. 5.

³³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 36.

Tabel I.2
Karakteristik informan

| No. | Nama Informan | Status | Keterangan |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Pebus Wibowo | Wakasek Bid. Kesiswaan | Informan Kunci |
| 2. | Retno Isdiyanti | Wakasek Bid. Kesiswaan | Informan Kunci |
| 3. | Andika Perdana | Siswa poin banyak | Informan Kunci |
| 4. | M.Jaelani | Siswa poin banyak | Informan Kunci |
| 5. | Indah Lestari | Siswa poin sedikit | Informan Kunci |
| 6. | Reza Syahputra | Siswa poin sedikit | Informan Kunci |
| 7. | Ibu Diah | Guru | Informan Tambahan |
| 8. | Ibu Widi | Guru | Informan Tambahan |
| 9. | Ibu Yeni | Wali Kelas | Informan Tambahan |
| 10. | Ibu Dian | Wali Murid | Informan Tambahan |

(Sumber: Data Olahan Peneliti 2016)

Peneliti memilih informan di atas dikarenakan informan tersebut dianggap sesuai dengan data dan keperluan yang akan di bahas oleh peneliti. Ibu Retno dan Pak Pebus dianggap dapat mewakili data mengenai pelaksanaan sistem poin pelanggaran di sekolah, sedangkan guru yang mengajar dianggap sebagai pihak yang mengalami secara langsung keterlibatan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Serta empat orang siswa yakni siswa yang memiliki poin banyak dan siswa yang memiliki poin sedikit, sebagai perbandingan terhadap dampak sistem poin pelanggaran terhadap interaksi dan proses pembelajaran siswa di sekolah. Pemilihan informan empat siswa dilakukan karena dianggap keempat siswa tersebut merupakan perwakilan yang tepat mewakili para siswa dalam mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh sistem poin bagi siswa, baik itu perwakilan dari siswa yang memiliki poin sedikit serta siswa yang memiliki poin banyak.

3. Peran Peneliti

Peneliti dalam kasus ini berperan sebagai peneliti luar, yakni peneliti yang merupakan pihak luar dari adanya kebijakan sistem poin pelanggaran di sekolah SMP 192 Jakarta. Selain itu, peneliti juga merupakan alumni dari sekolah tersebut, hal ini juga memudahkan peneliti di dalam melakukan penggalian informasi terhadap informan yang ada. Peran peneliti disini adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran ini berjalan di sekolah, yakni dengan melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan serta guru dan murid yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap penelitian. Langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti antara lain membuat review berbagai macam referensi dari buku, jurnal serta skripsi maupun tesis dan disertasi. Hal tersebut untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu langkah yang harus ditempuh oleh peneliti adalah mengurus proses administrasi perizinan untuk melakukan penelitian di Sekolah SMP Negeri 192 dengan cara mengurus surat-surat di BAAK UNJ.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai macam metode penelitian yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau narasumber. Pada metode ini

penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni melakukan wawancara dengan pembuat kebijakan terlebih dahulu dengan kemudian melanjutkan wawancara dengan penerima kebijakan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih tersusun, dimana satu pihak yang diajukan beberapa pertanyaan atau diminta pendapat. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka penulis juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, dokumentasi, atau material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b. Observasi

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada informan atau narasumber, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas seseorang yang sedang meneliti. Peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian serta berinteraksi secara intens dengan narasumber selama pengumpulan data.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan sebelum penelitian ini dilakukan, hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memanfaatkan berbagai macam penelitian pustaka, seperti buku, jurnal serta skripsi maupun tesis sejenis yang relevan dengan tema penelitian yang tengah diangkat oleh peneliti.

5. Analisis Data

Proses analisis data merupakan salah satu langkah dalam rangka memperoleh hasil temuan lapangan. Hal ini dikarenakan proses analisis data yang tepat akan memberikan kemudahan di dalam pemilihan dan penyajian data yang tepat. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah, sehingga perlu dilakukan penafsiran terhadap data agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan tema yang dibahas. Peneliti akan menganalisis data melalui data dari hasil temuan yang ada selama penelitian berlangsung.

Data wawancara, data dokumentasi serta studi kepustakaan digunakan sebagai bahan mentah yang akan dianalisis serta selanjutnya akan dikaitkan dengan konsep yang relevan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) dan kemudian akan disajikan dalam bentuk analisis teks. Wolcott 1994, membahas mengenai pentingnya di dalam membentuk deskripsi data dan juga menghubungkan data deskripsi tersebut dengan literature dan tema yang ada³⁴.

6. Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini memerlukan triangulasi data dalam melihat proses bagaimana implementasi kebijakan sistem poin ini berjalan di sekolah. Hal ini dikarenakan pihak yang membuat kebijakan yakni wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tidak dapat mengawasi sepenuhnya perjalanan sistem poin ini

³⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, h. 251.

dalam perjalanannya. Oleh karena itu untuk mendapatkan keabsahan data yang optimal maka diperlukan verifikasi data hasil wawancara informan kunci dengan hasil wawancara informan pendukung.

Setelah melakukan wawancara kepada para wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, peneliti pun akan melakukan kroscek dengan mewawancarai perwakilan wali murid yang merupakan pihak luar sekolah yang terlibat dalam hal pelaksanaan sistem poin pelanggaran. Berkenaan dengan wali murid akan dikroscek mengenai sudut pandang mereka mengenai pelaksanaan sistem poin tersebut, khususnya di Sekolah SMP Negeri 192 sendiri. Lalu yang terakhir berkenaan dengan pengamat adalah mengkroscek hasil data lapangan dalam perspektif sosiologis.

G. Sistematika Penulisan

Pada bab 1 (Pendahuluan), penulis ingin menjabarkan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metodologi penulisan. Alasan mengapa peneliti memilih judul “Penerapan Sistem Poin Sebagai Bentuk Hukuman Siswa Di Sekolah” adalah karena penulis menemukan terdapat berbagai kendala serta permasalahan terhadap penerapan sistem poin pelanggaran di sekolah.

Pada bab 2 peneliti akan menjelaskan profil mengenai Sekolah SMP Negeri 192 Sendiri yang beralamat di Jalan Kramat IV No. 100 Cipayung, Jakarta Timur. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai perkembangan sekolah dalam hal menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran sebagai bentuk hukuman yang

dipakai. Perkembangan sistem poin pelanggaran yang diterapkan secara umum, serta perkembangan penerapan sistem poin yang berlaku di sekolah SMP Negeri 192 Jakarta.

Pada bab 3 peneliti akan menjelaskan mengenai temuan lapangan yang didapat oleh peneliti pada saat observasi di sekolah. Temuan lapangan tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian, mulai dari bagaimana implementasi dari kebijakan sistem poin pelanggaran yang diterapkan oleh SMP Negeri 192 Jakarta. Proses pelaksanaan, permasalahan jenis pelanggaran dan upaya penanganan bagi pelanggaran yang dilakukan siswa akan dibahas dalam bab ini.

Pada bab 4 peneliti akan memaparkan analisa dari penelitian ini yaitu berbagai dampak dari implementasi sistem poin pelanggaran terhadap siswa itu sendiri. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan analisa melalui teori yang telah ditentukan oleh penulis yakni teori Institusi Sekolah, serta teori kontrol. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis dampak yang diterima siswa sebagai akibat dari diterapkannya sistem poin pelanggaran di sekolah. Dampak tersebut juga akan dianalisis sesuai dengan perspektif sosiologi mengenai respon perilaku siswa.

Pada bab 5 penulis akan menguraikan kesimpulan berdasarkan pemaparan penelitian dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan didapat dari hasil temuan lapangan peneliti serta hasil analisis menggunakan perspektif sosiologi. Selain itu, pada bab ini juga peneliti akan memberikan saran yang positif yang dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri khususnya.